

Editor in Chief

Drs. RaswanUdjang, M.Si

Managing Editor

TututDewiAstuti S.E., M.Si.,Ak., CA., CTA

Editorial Board

- Prof. Dr. Indra Bastian, MBA, CMA., Akt (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Dr. Greg Shailer, BCom., MCom., FCPA. (The Australian National University Canberra)
Dr. Harun Harun, M.Acc, CA (University of Canberra)
Dr. Sri Suryaningsum, MS.i, Ak, CA (Universitas Pembangunan Nasional Veteran)
Wisnu Haryo Pramudya, SE, M.Si, Ak, CA (Akademi Akuntansi YKPN)
Tutut Dewi Astuti, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Rochmad Bayu Utomo, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Nugraeni, SE, M.Sc (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Endang Sri Utami, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Hasim As'ari, SE, MM (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
M. Budiantara, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Mushawir, M.Si (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Zaenal Wafa, ST, M.Kom (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

Asistan Editor

Drs. Sumarsam

DwiRusniwati

ALAMAT REDAKSI

Pusat Pengembangan Akuntansi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jalan Wates km. 10
Yogyakarta 55753
Telpon (0274) 6498212 pesawat 145
Fax (0274) 6498213

<http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id>

Email: jurnal.umby@gmail.com

Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB) diterbitkan oleh Unit Publikasi Ilmiah & HaKI Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan hasil penelitian antara staf pengajar, alumni, mahasiswa.
JRAMB terbit dua kali setahun.
Redaksi menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan. Pedoman penulisan naskah untuk JRAMB tercantum pada bagian akhir jurnal ini.
Surat-menyurat mengenai artikel yang akan diterbitkan, langganan, keagenan dll, dialamatkan langsung ke alamat redaksi.



JURNAL RISET AKUNTANSI MERCU BUANA (JRAMB)
Pusat Pengembangan Akuntansi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Sekretariat: Jalan Wates Km. 10 Yogyakarta,
telpon (0274) 6498212 pesawat 144
email: jurnal.umby@gmail.com
web: www.mercubuana-yogya.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Edisi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga jurnal edisi pertama ini akhirnya dapat diterbitkan.

Redaksi menyadari bahwa jurnal edisi pertama ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya jurnal ini.

Semoga jurnal ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, 30 Mei 2016
Redaksi

DAFTAR ISI

Anggota Redaksi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Analisa Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada Industri Farmasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014)	
Annisa Faktkhul Jannah.....	1 - 20
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yogyakarta (Studi Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Atas Lkpd Yogyakarta Tahun 2010-2014 Khususnya Laporan Realisasi Anggaran)	
Aristyan Jeffri Nugroho, Martinus Budiantara	21 – 34
Model Prediksi Kepemilikan Manajerial Dengan Teknik Analisis Multinomial Logistik	
Triska Dewi Pramitasari, Isti Fadah, Hadi Paramu	35 - 58
Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (Sim)	
Gressi Hariyanti	59 – 81
Analisa Kerugian Negara Dengan Penerapan Audit Investigasi Pada Indikasi Kecurangan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten X Dengan Analisis <i>Fraud Triangle</i>	
Ifnatul Khasanah.....	82 – 104
Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening	
Manggar WUlan Kumala.....	105 – 118
Faktor Penentu Ketepatan Waktu <i>Corporate Internet Reporting</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei	
V.Wiratna Sujarweni, Lila Retnani Utami	119 – 137
Pedoman Penulisan Naskah	120

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YOGYAKARTA**
(Studi Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Atas LKPD Yogyakarta
Tahun 2010-2014 Khususnya Laporan Realisasi Anggaran)

Aristyan Jeffri Nugroho¹, Martianus Budiantara²

¹²Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi, UniversitasMercurBuana Yogyakarta

¹krisnak@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Yogyakarta. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio efisiensi. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Yogyakarta tahun 2010-2014 yang telah diaudit oleh BPK. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) semua kabupaten/kota dan provinsi DIY. Hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diukur dengan menggunakan software SPSS 16. Hasil penelitian ini adalah tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja daerah juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah.

**FACTORS AFFECTING FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT/CITY
LOCAL GOVERNMENT OF YOGYAKARTA**

Case Study of Audit Inquiry Reports of Indonesian Supreme Audit Institution on the 2010-2014
Yogyakarta Local Government Financial Report
Especially on the Budget Realization Report

Aristyan Jeffri Nugroho¹, Martianus Budiantara²

¹²Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi, UniversitasMercurBuana Yogyakarta

¹krisnak@gmail.com

Abstract

The research aims to find out factors of financial performance of regencies or city local government in Yogyakarta. The independent variables are wealth of local government, dependence on central government, and local government expenditures. On the other hand, the dependent variable is financial performance of local government as measured by the efficiency ratio. The population of this research is local government financial report of Yogyakarta in the period 2010-2014 audited by BPK. The samples are budget realization report of all regencies or city and the province of Daerah Istimewa Yogyakarta. Hypothesis of this research was examined by using multiple regression in SPSS 16 software. The result of this research indicates that wealth of local government has significant positive effect on the financial performance of local government. The dependence on central government has significant positive effect on the financial performance of local government. Then, local government expenditures also have significant positive effect on the financial performance of local government.

Keywords: *wealth of local government, dependence on central government and local government expenditures, financial performance of local government.*

PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi pada tahun 2000 yang mensyaratkan perlunya pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah termasuk di bidang keuangan daerah. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu implementasi dari paradigma hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal.

Anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi yang berarti bahwa anggaran merupakan rencana keuangan masa datang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya dan transaksi keuangan lain dalam masa satu tahun. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu kebijakan akan sulit diwujudkan pelaksanaannya tanpa didukung oleh ketersediaan anggaran karena anggaran merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan program-program dan kebijakan, pemerintah daerah perlu didukung dengan adanya anggaran. Anggaran dalam pemerintah daerah yang berisi rencana keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Mahmudi (2010: 2) dalam Muhibtari (2014) terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas kinerja keuangan, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan berupa laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Bentuk pertanggungjawaban sumber-sumber keuangan daerah dan penggunaannya adalah dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran meliputi: Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Sumber penerimaan pendapatan daerah digunakan untuk menjalankan program/kegiatan pemerintah daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber dalam penerimaan pendapatan daerah. PAD menggambarkan tingkat kekayaan dalam suatu daerah. PAD merupakan upaya pemerintah daerah dalam menghasikan pendapatan secara mandiri. Setiap daerah memiliki potensi daerah dan sumber-sumber pendapatan yang berbeda-beda. Semakin besar tingkat pendapatan asli daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan sumber dana yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah. Sehingga nantinya akan terlihat kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Karena dengan jumlah PAD yang tinggi, maka akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan program/kegiatan pelayanan publik baik infrastruktur maupun dari segi pelayanan publik lainnya.

DAU, menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat (APBN) yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah yang dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan DAU ini menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Alokasi DAU dari pemerintah pusat ke setiap daerah juga berbeda-beda. Bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU

relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar publik yang dimaksud antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Pemerintah pusat sebagai penyedia DAU akan memantau pemanfaatan DAU sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Pengelolaan dan pemanfaatan dana anggaran belanja daerah akan menggambarkan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan ekonomi, efisiensi dan efektivitas dana APBD. Dari konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang terealisasi dengan belanja daerah seharusnya dapat menghasilkan

output dan outcome yang telah ditetapkan dalam visi dan misi program/kegiatan. Sehingga semakin besar realisasi belanja, output dan outcome dapat tercapai dengan maksimal yang akan menunjukkan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan evaluasi atas kinerja keuangannya. Menurut Mardiasmo (2007) dalam Mirza (2012) menyebutkan bahwa kinerja pemerintah menjadi suatu hal yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan negara. Artinya kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Berdasarkan paparan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, secara bersama-

sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

Tingkat kekayaan daerah dalam penelitian ini digambarkan dengan total PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri. Semakin besar tingkat pendapatan asli daerah, semakin besar juga tuntutan atau kewajiban pemerintah dalam pengungkapan atas penggunaan sumber-sumber penerimaan daerah untuk kebutuhan pelayanan publik sehingga akan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya. Dalam laporan realisasi anggaran akan ditunjukkan berapa jumlah total penerimaan daerah dibandingkan dengan anggarannya. Semakin tinggi realisasi PAD dibandingkan dengan anggaran akan menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Sudarsana dan Shiddiq (2013) di dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat diperoleh hipotesis H1 : Tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam penelitian ini digambarkan dengan penerimaan

dana perimbangan yaitu DAU (Dana Alokasi Umum). Alokasi DAU dari pemerintah pusat ke setiap daerah juga berbeda-beda. Bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar publik yang dimaksud antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Pemerintah pusat sebagai penyedia DAU akan melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan DAU sesuai dengan prioritas, kepentingan dan kebutuhan daerah sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Marfiana dan Kurniasih (2013) di dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa DAU berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Belanja daerah menggambarkan alokasi penggunaan sumber-sumber penerimaan daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan dana anggaran belanja daerah akan menggambarkan tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan

ekonomi, efisiensi dan efektivitas dana APBD. Dalam penelitian ini, belanja daerah digambarkan dengan total belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Sehingga pemerintah daerah akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan alokasi belanja sumber keuangan daerah. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja berkaitan dengan pemanfaatan sumber keuangan daerah. Marfiana dan Kurniasih (2013) di dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, dapat diperoleh hipotesis:

H3 : Belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Dari uraian hipotesis diatas, dikembangkan hipotesis berdasarkan pengaruh secara bersama-sama variabel independen yaitu tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga diperoleh hipotesis:

H4 : Tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan belanja daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder. Kuswadi dan Mutiara (2004) dalam Mirza (2012) menyebutkan bahwa data sekunder (*secondary data*) yaitu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik pengumpulan data dari basis data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari *softcopy* BPK RI Perwakilan Provinsi DIY.

Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah Provinsi DIY yang telah diaudit oleh BPK RI pada tahun 2010-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam penelitian ini terdapat 4 sampel kabupaten, 1 kota dan 1 provinsi yaitu kabupaten Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul, Kota Yogyakarta dan DIY. Sehingga diperoleh data sebanyak 30 (5 tahun anggaran x 6). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh (*sensus*) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Definisi operasional variabel

a. Variabel Independen

Tingkat kekayaan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber dan potensi keuangan di daerahnya. Tingkat kekayaan daerah dalam penelitian ini diproksikan dengan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).

$$\text{Tingkat kekayaan daerah} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

Sumber: Marfiana dan Kurniasih, 2013

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam pelaksanaan kegiatan dan program daerah. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013), tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diproksikan dengan Total DAU terhadap Total Pendapatan Daerahnya.

$$\text{Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum (DAU)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}}$$

Sumber: Marfiana dan Kurniasih, 2013

Belanja daerah menggambarkan pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Dalam hal ini dituntut adanya efisiensi belanja, sehingga realisasi belanja daerah diharapkan dapat diminimalkan sehingga tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Tingkat belanja daerah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana dan Shiddiq (2013) yang memproksikan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah.

$$\text{Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Sumber: Sudarsana dan Shiddiq, 2013

b. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini diukur dengan efisiensi dalam mengelola keuangan daerah. Pengukuran ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013). Untuk mengukur tingkat efisiensi digunakan perbandingan antara realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Sehingga rumus tingkat efisiensi:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

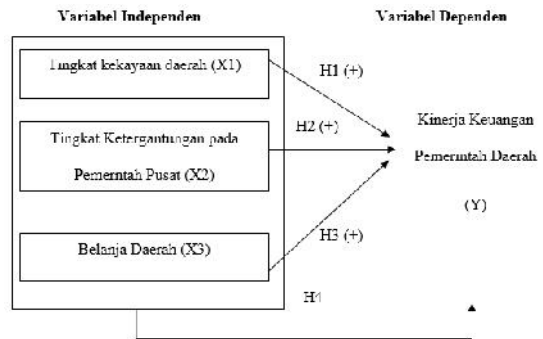
Sumber: Mahsun, 2014 : 191

Kriteria efisiensi adalah:

- 1). Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien
- 2). Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisien berimbang
- 3). Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien

Model Penelitian

Gambar 1: Kerangka Penelitian



Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
KINERJA	94,2030	5,26877	30
PAD	64,0377	15,06573	30
DAU	51,8417	7,54213	30
BELANJA	90,4880	3,62164	30

Sumber: data sekunder diolah, 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, rata-rata kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Yogyakarta adalah 94,20%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berada pada tingkat

efisiensi anggaran karena prosentase di bawah 100%. Artinya, pemerintah DIY mampu menggunakan sumber daya keuangan daerah (*output*) berupa realisasi belanja daerah untuk menghasilkan *input* atau pemasukan keuangan daerah yang lebih tinggi atau dengan kata lain,

input yang dihasilkan lebih tinggi daripada outputnya.

Tingkat kekayaan daerah yang diperoleh dari perbandingan antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah menunjukkan nilai 64,03%. Hasil ini menggambarkan bahwa rata-rata porsi pendapatan asli daerah adalah tinggi karena pemerintah daerah mampu menghasilkan

pendapatan diatas 50% dari total pendapatan daerahnya.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diperoleh dari perbandingan antara dana alokasi umum dan total pendapatan daerah menunjukkan nilai

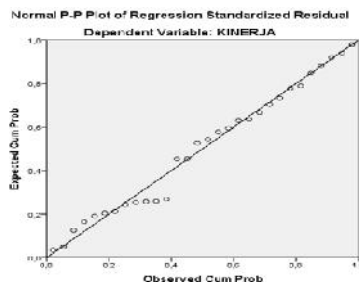
51,84%. Hasil ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi, karena 50% lebih dari rata-rata total pendapatan daerah diperoleh dari dana alokasi umum.

Tingkat belanja daerah yang diperoleh dari realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran belanja daerah menunjukkan nilai 90,48%. Hasil ini menggambarkan bahwa pemerintah mampu menggunakan dananya dengan baik karena tidak melebihi rencana anggaran belanja.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber: data sekunder diolah, 2016

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik PP Plots. Suatu data akan terdistribusi secara normal jika nilai probabilitas yang diharapkan adalah sama dengan nilai pengamatan. Dari grafik terlihat

bahwa nilai PP Plots terletak di sekitar garis diagonal atau tidak menyimpang jauh dari garis diagonal. Sehingga bisa diartikan bahwa data dalam penelitian terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Coefficients

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	
1	.690 ^a	.476	.458	3,87984	.476	25,480	1	28	.000
2	.777 ^b	.604	.575	3,43516	.128	8,718	1	27	.006
3	.816 ^c	.666	.627	3,21725	.061	4,781	1	26	.038

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU

c. Predictors: (Constant), PAD, DAU, BELANJA

d. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: data sekunder diolah, 2016

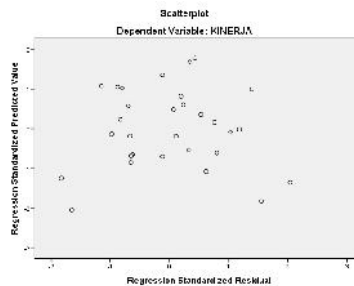
2. Uji Multikolinieritas

Data dalam penelitian regresi dikatakan bebas multikolinieritas apabila nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1. Berdasarkan hasil tabel di atas semua variabel dalam penelitian memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Scatterplot. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki kesamaan variansi atau tidak. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas heteroskedastisitas jika masing-masing variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai absolut variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, terlihat bahwa penyebaran residual adalah tidak teratur. Hal tersebut dapat dilihat pada plot yang terpecah dan

tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.690 ^a	.476	.458	3,87984	.476	25,480	1	28	.000	
2	.777 ^b	.604	.575	3,43516	.128	8,718	1	27	.006	
3	.816 ^c	.666	.627	3,21725	.061	4,781	1	26	.038	1,724

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU

c. Predictors: (Constant), PAD, DAU, BELANJA

d. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Nilai DW sebesar 1,724 tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan nilai tabel signifikansi 5%. Jumlah sampel 30 dan

jumlah variabel independen adalah 3 ($k=3$) maka diperoleh nilai du 1,6498. Nilai DW 1,724 lebih besar dari batas bawah (du) yaitu

1,6498 dan kurang dari (4-du) yaitu 2,3502. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi

berganda. Metode yang digunakan adalah *Stepwise*.

Analisis regresi berganda

Hasil analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda

Model Summary ^d										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F	
1	,680 ^a	,476	,458	3,87984	,476	25,480	1	28	,000	
2	,777 ^b	,604	,575	3,43516	,128	8,718	1	27	,006	
3	,816 ^c	,666	,627	3,21725	,081	4,781	1	26	,038	1,724

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU

c. Predictors: (Constant), PAD, DAU, BELANJA

d. Dependent Variable: KINERJA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	383,550	1	383,550	25,480	,000 ^b
	Residual	421,487	28	15,053		
	Total	805,038	29			
2	Regression	486,430	2	243,215	20,611	,000 ^c
	Residual	318,608	27	11,800		
	Total	805,038	29			
3	Regression	535,919	3	178,640	17,259	,000 ^d
	Residual	269,119	26	10,351		
	Total	805,038	29			

a. Dependent Variable: KINERJA

b. Predictors: (Constant), PAD

c. Predictors: (Constant), PAD, DAU

d. Predictors: (Constant), PAD, DAU, BELANJA

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	34,358	16,168		2,125	,043		
PAD	,114	,052	,326	2,200	,037	,587	1,704
DAU	,267	,096	,382	2,773	,010	,677	1,477
BELANJA	,428	,196	,294	2,187	,038	,711	1,407

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, maka model persamaan regresi inier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 34,358 + 0,114 X_1 + 0,267 X_2 + 0,428 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja keuangan pemerintah DIY

X₁ = Tingkat kekayaan daerah (PAD)

X₂ = Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU)

X₃ = Belanja daerah

e = Error

Persamaan regresi menunjukkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 34,358 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 34,358.
2. Nilai koefisien variabel tingkat kekayaan daerah (PAD) sebesar 0,114 menunjukkan bahwa saat tingkat kekayaan daerah naik sebesar satu satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan bertambah sebesar 0,114.
3. Nilai koefisien variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) sebesar 0,267 menunjukkan bahwa ketika tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat naik sebesar satu satuan maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,267.
4. Nilai koefisien variabel belanja daerah sebesar 0,428 menunjukkan bahwa ketika belanja daerah naik sebesar satu satuan

maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik sebesar 0,428.

Di bawah ini merupakan penjelasan dari uji regresi berganda yang telah dilakukan:

1. Uji t

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh hasil uji t yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat kekayaan daerah (PAD)

Dari uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,114 dan nilai probabilitas sebesar 0,037. Hipotesis ditolak jika nilai probabilitas 0,05. Ho ditolak artinya tingkat kekayaan daerah memilikipengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU)

Dari uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,267 dan nilai probabilitas sebesar 0,010. Hipotesis ditolak jika nilai probabilitas 0,05. Ho ditolak artinya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Belanja daerah

Dari uji t diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,428 dan nilai probabilitas 0,038. Hipotesis ditolak jika nilai probabilitas 0,05. Ho ditolak artinya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Uji Signifikansi Simultan F

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai probabilitas uji F sebesar 0,000. Nilai probabilitas uji $F < 0,05$ menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, ketergantungan pemerintah daerah dan belanja daerah secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square (Adj. R^2)* sebesar 0,627 atau mendekati angka 1. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen berupa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dan belanja daerah memiliki pengaruh yang kuat dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu sebesar 62,7% , sedangkan sisanya 37,3% dijelaskan oleh faktor lain.

1. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian regresi sebelumnya, tingkat kekayaan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil probabilitas menunjukkan angka positif. Sehingga hasil tersebut mendukung hipotesis bahwa tingkat kekayaan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana dan Shiddiq (2013) yang

menyimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil pengujian regresi sebelumnya, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diperoleh dari dana alokasi umum (DAU) secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai probabilitas menunjukkan angka positif. Sehingga hasil tersebut mendukung hipotesis awal bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diperoleh dari DAU memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari hasil pengujian regresi sebelumnya, tingkat belanja daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nilai probabilitas menunjukkan angka positif. Sehingga hasil tersebut mendukung hipotesis bahwa belanja daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan

Kurniasih (2013) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Secara Bersama-sama Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan uji signifikansi simultan F, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Tingkat kekayaan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Yogyakarta. Hasil analisis data yang dilakukan mendukung hipotesis awal penelitian.
2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis data ini mendukung hipotesis awal penelitian.
3. Belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah Yogyakarta. Hasil analisis data ini mendukung hipotesis awal penelitian.

4. Tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Anggraini, Yunita dan B. Hendra Puranto. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Diambil dari: <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id>. (10 Oktober 2015)
- Mirza, Rifka Amalia. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2005-2010*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Muhibtari, Astriana Nabila. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Ritonga, Irwan Taufiq dan Ehrmann Suhartono. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah

- Rustiyangsih, Sri dan Intan Immanuela. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah*. Diambil dari: <http://id.portalgaruda.org>. (23 Oktober 2015)
- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari. 2005. *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Yogyakarta: ANDI
- Sudarsana, Hafidh Susila dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Diambil dari: <http://id.portalgaruda.org>. (19 Oktober 2015)
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- _____. 2014. *Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD*. Diambil dari: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. (30 September 2015)